



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 409846

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 792.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 396.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 396.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.190.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO GRANDROAD Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 31.190.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 610.085.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.214.822

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.534.489.822

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.534.489.822

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.